

INTISARI

DESKRIPSI TENTANG PERHITUNGAN SUARA ULANG HASIL PILKADA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana**



**ALBERTO ARIGUSTUS TATIBUN
20310018**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

18 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH., M. Hum

NIDN : 0820086101



Tontji Ch. Rafael, SH., MH

NIDN : 0808067101

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha

Fakultas Hukum

Wacana Kupang



Prof. Dr. Ir. Godliet Frederik Neonufa, MT
NIDN : 0821046601



Dr. Melkiannus Ndapmanu, SH., M. Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari **SENIN** tanggal 18 (**DELAPAN BELAS**) bulan **DESEMBER** tahun **2023 (DUA RIBUH DUA PULUH TIGA)** telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

NAMA : BENYAMIN BABA LOLON
NIM : 17312099
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Non Subsidi Antara Pt Taiko Persada Indoprima Dan Pt Perkebunan Nusantara II

PANITIA PENGUJI

Ketua : Soleman Kette, S.H., M.Hum (.....) 
Sekertaris : Tontji Ch Rafael, S.H., MH (.....) 
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin Amd, S.H., M.H (.....) 
2. Jeremia Alexander Wewo, S.H., MH (.....) 
3. Rian Van Frits Kapitan, SH., MH (.....) 

Kupang 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Karya ilmiah ini berjudul “Deskripsi Tentang Perhitungan Suara Ulang Hasil Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Oleh Komisi Pemilihan Umum”. Masalah yang ingin dipecahkan penulis melalui tulisan ini yaitu, pertama: Mengapa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan perhitungan suara ulang hasil pilkada Kabupaten TTS?. Kedua: Bagaimana akibat hukum dari perhitungan ulang hasil pilkada tersebut terhadap KPU, PPK, PPS, KPPS?

Tujuan penelitian untuk menjawab persoalan diatas yaitu, pertama : Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan perhitungan suara ulang hasil pilkada Kabupaten TTS, dan kedua yaitu : Untuk mengetahui akibat hukum dari perhitungan suara ulang hasil pilkada tersebut terhadap penyelenggara

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normative, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, studi dokumen dilakukan pada putusan MK 61/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten TTS

Alasan Mahkamah memerintahkan perhitungan suara ulang karena dua alasan yaitu pertama : Permohonan pemohon memenuhi syarat formil, kedua yaitu : Adanya bukti pelanggaran dalam perhitungan hasil pilkada tersebut. Sedangkan akibat hukum dari perhitungan suara ulang hasil pilkada tersebut terhadap penyelenggara yaitu, pertama Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 30 TPS, kedua : KPU Kabupaten TTS, KPU Provinsi NTT, dan KPU untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan; dan ketiga DKPP memanggil, menyidang, dan memberikan teguran keras kepada KPU Kabupaten TTS.

Saran penulis, terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran sebaiknya dihentikan, dan proses PSU diambilalih KPU Provinsi sedangkan penyelenggara *ad hoc* ditugaskan kepada penyelenggara Kecamatan terdekat.

Kata Kunci : Pilkada, Sengketa, PSU, TTS

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakir, Herman.** (2007). *Filsafat Hukum : Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Penerbit : PT. Refika Aditama
- Simarmata, Leonardus.** (2021). *Pilkada : Optimalisasi Sentra Gakkumdu dan Peran Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Demokratis*. Penerbit : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Santoso, Topo. dan Budhiati, Ida.** (2019). *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Penerbit : Sinar Grafika
- Aris, Mohammad Syaiful.** (2021). *Hukum Pemilu : Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Penerbit : Setara Press
- Widodo, Heru.** (2018). *Hukum Acara Sengketa Pilkada : Dinamika di Mahkamah Konstitusi*. Penerbit : Konstitusi Press (Konpress).
- Asshiddiqie, Jimly.** (2002), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal. 22.*
- Sahabuddin, Andi Arfan.** (2020). *Konsep Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*. PAULUS Law Journal. Vol. 2 Nomor 1, September 2020. e-ISSN : 2722-8525.
- Chandranegara, Ibnu Sina.** (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Penerbit : Sinar Grafika
- Budhiati, Ida.** (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*. Penerbit : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.** 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Refly Harun,** 2019. *Hukum Sengketa Pemilu, Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konsitusi*. Penerbit : Konstitusi Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum
- Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

C. Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 228/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan

D. Jurnal

- KPU DIY, “Sejarah Pemilu Di Indonesia,” dalam [https:// diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/](https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/), Akses Oktober 2023.
- Christian Adiputra Oruwo, Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dari Masa Penjajahan sampai Reformasi. [https://www.detik.com/edu/detikpedia /d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi). Diakses Oktober 2023
- Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 Nomor 1, Juli 2018
- Putu Eva Ditayani Antari, (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum* Vol 3. No. 1, Juni 2018
- Tarsan Umarama, (2021). Politik Hukum Ketatanegaraan Dan Pemilu Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* Vol. 7 No. 1, Juni 2021
- R. Fauzi Zuhri Pradika.1 Happy Anugraha Sutrisno Putra.2 Anwar Noris, (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum* Vol 6 No 1, April 2020
- Depri Liber Sonata, (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014
- Dachran Busthami, (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017
- Zulfikar, (2023). Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 5 No. 1, November 2023

